

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara demokrasi yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Salah satu perwujudan kedaulatan rakyat tersebut ialah melalui pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Pemilu dan Pilkada tidak hanya dimaknai sebagai proses politik, tetapi juga sebagai bagian dari pelayanan publik di mana masyarakat terlibat untuk mengontrol jalannya kebijakan melalui mekanisme partisipasi publik. Dalam perspektif administrasi publik, partisipasi publik pada Pilkada adalah instrumen *democratic accountability* yang memastikan kebijakan publik lokal berjalan responsif. Ketika partisipasi menurun, kapasitas kontrol warga terhadap proses kebijakan melemah sehingga kualitas *check and balance* governance lokal ikut menurun. Semakin tinggi tingkat partisipasi publik, maka semakin kuat pula legitimasi pemerintahan yang terbentuk (Santoso et al., 2024).

Berdasarkan data resmi dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), tingkat partisipasi pemilih nasional mengalami fluktuasi selama tiga periode terakhir. Pada Pemilu 2014, tingkat partisipasi pemilih tercatat sebesar 75% untuk pemilihan legislatif dan 70% untuk pemilihan presiden. Angka tersebut meningkat signifikan pada Pemilu Serentak 2019 menjadi 81%, dan kembali menunjukkan kestabilan pada Pemilu 2024 dengan partisipasi sebesar 81,48% untuk pemilihan presiden. Peningkatan ini menggambarkan konsistensi antusiasme masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya, meskipun masih terdapat tantangan dalam menjaga kualitas partisipasi publik. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai perkembangan partisipasi pemilih nasional selama tiga periode terakhir, berikut disajikan data rekapitulasi yang bersumber dari laporan resmi KPU RI (2014–2024).

Tabel 1. Tren partisipasi pemilih nasional selama tiga Pemilu terakhir

Tahun	Jenis Pemilu	DPT Nasional	Pengguna Hak Pilih	Partisipasi Nasional (%)
2014	Pemilu Presiden & Legislatif	190.307.134	±133 juta	75 (Pileg), 70 (Pilpres)
2019	Pemilu Serentak	199.987.870	158.012.506	81
2024	Pemilu Serentak	204.807.222	168.422.011	81,48

Sumber: KPU RI (2014–2024).

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa tingkat partisipasi pemilih nasional menggambarkan tren yang cenderung stabil dari tahun ke tahun. Meskipun tidak mengalami peningkatan yang signifikan antara 2019 dan 2024, partisipasi yang konsisten di atas 80 persen mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan Pemilu dalam menjaga partisipasi masyarakat.

Selain tingkat partisipasi pemilih yang relatif stabil, hal menarik dari Pemilu 2019 dan 2024 adalah meningkatnya jumlah pemilih muda dan pemilih pemula secara signifikan. Berdasarkan data KPU RI, jumlah pemilih muda pada Pemilu 2019 mencapai sekitar 60,3 juta orang atau 31,63 persen dari total pemilih, sedangkan pada Pemilu 2024 meningkat menjadi sekitar 118,5 juta orang atau 58,38 persen dari total Daftar Pemilih Tetap (DPT). Peningkatan ini mempresentasikan bahwa generasi Z memiliki potensi besar dalam menentukan arah demokrasi Indonesia. Namun peningkatan jumlah tersebut belum diikuti dengan kualitas keterlibatan publik. Banyak pemilih muda menunjukkan rendahnya *engagement* dalam proses pelayanan publik kepemiluan, terutama terkait akses informasi, pemahaman prosedur, dan kontrol terhadap kebijakan yang dijalankan penyelenggara pemilu.

Fenomena di Indonesia tersebut sejalan dengan kondisi global sebagaimana dilaporkan oleh *International Institute for Democracy and Electoral Assistance* (IDEA,

2022) yang mencatat bahwa rata-rata tingkat partisipasi pemilih muda di negara-negara demokrasi berada di bawah 60 persen. Artinya, tantangan dalam meningkatkan partisipasi elektoral generasi muda bukan hanya dihadapi oleh Indonesia, tetapi juga oleh banyak negara demokrasi di dunia. Senada dengan itu, laporan *Youth Voter Participation* (OECD, 2023) menegaskan bahwa meskipun terjadi peningkatan partisipasi politik digital di kalangan pemuda, tingkat partisipasi elektoral mereka masih berada di bawah rata-rata nasional. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa persoalan rendahnya partisipasi pemuda bersifat global dan memerlukan strategi pendekatan yang lebih kreatif, edukatif, serta adaptif terhadap perkembangan media digital.

Di sisi lain, meskipun tingkat partisipasi nasional meningkat, fenomena rendahnya penggunaan hak pilih masih menjadi tantangan pelayanan publik kepemiluan. Rendahnya partisipasi publik ini menunjukkan masih lemahnya akses informasi dan kontrol masyarakat terhadap proses kebijakan penyelenggaraan pemilu, terutama pada kelompok pemilih muda. Berdasarkan data CNN Indonesia (2023), jumlah golput pada Pemilu Legislatif mengalami penurunan dari 24,89 persen pada 2014 menjadi 18,31 persen pada 2019, sedangkan pada Pemilu Presiden turun dari 30,22 persen pada 2014 menjadi 18,03 persen pada 2019. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun masyarakat (publik) meningkat, masih ada kelompok pemilih, terutama pemilih muda dan pemula yang bersikap apatis terhadap layanan/informasi kepemiluan publik. Oleh karena itu, upaya peningkatan partisipasi publik harus diiringi dengan penguatan literasi kepemiluan / literasi partisipasi publik dan sosialisasi yang lebih intensif bagi generasi muda.

Penetapan angka partisipasi pemilih oleh KPU RI mengacu pada formula resmi sebagaimana tercantum dalam Surat KPU Nomor 538/PP.06-SD/09/2024, yaitu dengan membandingkan jumlah pengguna hak pilih dengan total DPT pada setiap wilayah administratif. Berdasarkan Keputusan KPU RI Nomor 1043 Tahun 2024

tentang Penetapan Tingkat Partisipasi Pemilih pada Pemilihan Umum Tahun 2024, rekapitulasi nasional menunjukkan tingkat partisipasi sebesar 81,48 persen dengan distribusi yang relatif merata di seluruh wilayah Indonesia. Data ini memperkuat dasar empiris bagi penelitian yang berfokus pada tren partisipasi pemilih muda, baik di tingkat nasional maupun daerah.

Namun demikian, pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024 menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat secara nasional belum mencapai target yang ditetapkan. Berdasarkan data KPU RI (2024), tingkat partisipasi pemilih dalam Pilkada Serentak 2024 hanya mencapai 68 persen, menurun dibandingkan 73,2 persen pada Pilkada 2018, sementara target nasional ditetapkan sebesar 82 persen. Penurunan ini menggambarkan adanya tantangan baru dalam menjaga kesadaran politik masyarakat yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kejenuhan politik akibat penyelenggaraan Pemilu nasional dan Pilkada di tahun yang sama, serta menurunnya minat masyarakat terhadap isu politik lokal.

Untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif, berikut disajikan perbandingan tingkat partisipasi pemilih di tingkat nasional, Provinsi Jawa Tengah, dan Kabupaten Banyumas pada dua pelaksanaan Pilkada terakhir. Data ini bertujuan untuk menunjukkan adanya pergeseran tren partisipasi publik dari tingkat nasional hingga lokal, sekaligus mengilustrasikan fenomena penurunan partisipasi pada wilayah tertentu.

Tabel 2. Tingkat Partisipasi Pemilih Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Banyumas

Wilayah	Tahun	Jenis Pemilihan	DPT	Pengguna Hak Pilih	Partisipasi (%)
Jawa Tengah	2018	Pilkada Serentak	27.409.207	20.028.049	73,04 %

Jawa Tengah	2024	Pilkada	28.289.413	23.085.022	81,64 %
		Serentak			
Kabupaten	2018	Pilkada	1.302.438	969.060	74,37 %
Banyumas		Serentak			
Kabupaten	2024	Pilkada	1.390.832	958.680	68,9%
Banyumas		Serentak			

Sumber: KPU RI (2024); KPU Provinsi Jawa Tengah (2024)

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa tren partisipasi di Jawa Tengah justru meningkat dari 73,04 persen menjadi 81,64 persen, sedangkan di Kabupaten Banyumas mengalami penurunan cukup signifikan dari 74,37 persen menjadi 68,9 persen. Hal ini menunjukkan adanya dinamika yang berbeda antara tingkat provinsi dan kabupaten, yang menandakan perlunya perhatian khusus terhadap penyelenggaraan pemilu di tingkat lokal.

Penurunan ini menunjukkan adanya tantangan dalam efektivitas pelayanan publik kepemiluan. Meski jumlah DPT meningkat, kualitas keterlibatan publik menurun, menunjukkan bahwa strategi sosialisasi dan edukasi belum optimal menjangkau kelompok tertentu, terutama pemilih pemula. Berdasarkan data KPU Banyumas (2024), jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pilkada 2024 mencapai 1.390.832 orang, terdiri dari 696.142 pemilih laki-laki dan 694.690 pemilih perempuan. Meskipun secara kuantitatif jumlah pemilih meningkat dibanding tahun 2018, partisipasi justru menurun. Artinya, masalahnya bukan pada ketersediaan pemilih potensial, melainkan pada minat dan kesadaran politik masyarakat.

Beberapa faktor lokal turut mempengaruhi penurunan partisipasi ini, seperti penggabungan beberapa TPS, mobilitas warga Banyumas yang merantau ke luar daerah, cuaca hujan saat pemungutan suara, serta kejenuhan politik akibat pelaksanaan Pemilu nasional dan Pilkada dalam tahun yang sama. KPU Kabupaten Banyumas sebenarnya telah menjalankan berbagai strategi untuk meningkatkan partisipasi publik,

mulai dari sosialisasi tatap muka, kolaborasi dengan sekolah, komunitas, hingga kerja sama dengan media seperti RRI. Berbagai inovasi edukatif seperti pemutaran film kepemiluan, forum warga, dan permainan interaktif juga dilakukan. Namun, efektivitas strategi tersebut masih perlu dievaluasi secara mendalam, khususnya dalam menjangkau pemilih pemula. Selain itu, aspek yang juga berpengaruh adalah tingkat partisipasi pemilih pemula yang relatif rendah, padahal jumlahnya terus meningkat. Berdasarkan data KPU, jumlah pemilih pemula di Banyumas naik dari 129.288 orang pada Pemilu 2019 menjadi 134.689 orang pada Pemilu 2024.

Pemilih pemula yang sebagian besar berasal dari generasi Z masih menunjukkan keterlibatan publik yang rendah terkait akses informasi kepemiluan. Hal ini menandakan bahwa mekanisme layanan informasi dan edukasi dari KPU belum optimal dalam meningkatkan literasi kepemiluan kelompok ini. Kondisi ini juga ditegaskan dalam laporan lokal dan nasional yang menyoroti rendahnya partisipasi generasi muda dalam politik formal. KPU di berbagai daerah telah berupaya mengatasinya melalui berbagai program seperti “KPU Goes to School”, namun efektivitasnya di Banyumas masih perlu dikaji lebih dalam.

Dengan memperhatikan tren partisipasi dan fenomena golput baik di tingkat nasional maupun daerah, penelitian ini menjadi sangat relevan dan urgen dilakukan. Dengan memperhatikan kondisi tersebut, penelitian ini penting untuk melihat bagaimana strategi KPU Kabupaten Banyumas dalam meningkatkan partisipasi publik pemilih pemula sebagai bagian dari upaya memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pelayanan publik kepemiluan.

Berdasarkan kondisi penurunan partisipasi pemilih pemula di Kabupaten Banyumas pada Pilkada 2024, KPU Kabupaten Banyumas menghadapi tantangan kompleks dalam menjalankan fungsi pelayanan publik kepemiluan. Meskipun berbagai program sosialisasi seperti “KPU Goes to School”, kolaborasi dengan organisasi kepemudaan, pemanfaatan media sosial, hingga kerjasama dengan media massa seperti

RRI Purwokerto telah dilaksanakan, efektivitas strategi tersebut dalam menjangkau dan meningkatkan partisipasi pemilih pemula masih perlu dievaluasi secara mendalam. Fenomena penurunan partisipasi dari 74,37% pada 2018 menjadi 68,9% pada 2024 menunjukkan adanya gap antara strategi yang dirancang dengan hasil yang dicapai, terutama dalam konteks karakteristik pemilih pemula yang memiliki preferensi komunikasi dan akses informasi yang berbeda dengan segmen pemilih lainnya.

Dalam perspektif manajemen strategi, upaya peningkatan partisipasi publik pemilih pemula memerlukan pendekatan yang sistematis mulai dari perumusan strategi (*strategy formulation*), implementasi strategi (*strategy implementation*), hingga evaluasi strategi (*strategy evaluation*) sebagaimana dikemukakan oleh David (2016). Ketiga tahapan ini penting untuk memahami bagaimana KPU Kabupaten Banyumas mengidentifikasi permasalahan, merancang program yang relevan dengan karakteristik pemilih pemula, melaksanakan program melalui koordinasi berbagai pihak, serta mengevaluasi efektivitas strategi yang telah diterapkan. Dengan jumlah pemilih pemula yang terus meningkat dan mencapai sekitar 10% dari total DPT di Kabupaten Banyumas, strategi yang tepat sasaran menjadi kunci untuk memastikan bahwa generasi muda tidak hanya terdaftar sebagai pemilih tetapi juga aktif berpartisipasi dalam proses demokrasi lokal.

Dari penjelasan di atas, menunjukkan bahwa strategi peningkatan partisipasi publik pemilih pemula yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Banyumas pada Pilkada 2024 perlu dikaji secara komprehensif untuk memahami dinamika kelembagaan, tantangan yang dihadapi, serta efektivitas program yang telah dilaksanakan. Hal ini penting untuk mengetahui apakah KPU Kabupaten Banyumas telah menerapkan prinsip-prinsip manajemen strategi secara optimal dalam menjangkau pemilih pemula, serta untuk mengidentifikasi praktik terbaik dan area yang memerlukan perbaikan pada penyelenggaraan pemilu atau pilkada selanjutnya. Oleh karena itu, penelitian ini mengambil fokus pada "Strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banyumas dalam Meningkatkan Partisipasi Publik Pemilih Pemula pada Pilkada Tahun

2024" untuk memberikan kontribusi akademik dalam kajian administrasi publik sekaligus rekomendasi praktis bagi penguatan demokrasi lokal melalui peningkatan kualitas partisipasi generasi.

